

**PENGUNAAN BERITA ACARA LABORATORIES KRIMINAL  
SEBAGAI BUKTI SURAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Prasyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Satya Dipa Asriga

NIM E0010323

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

**PENGUNAAN BERITA ACARA LABORATORIES KRIMINAL  
SEBAGAI BUKTI SURAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Prasyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Satya Dipa Asriga

NIM E0010323

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENGUNAAN BERITA ACARA LABORATORIES KRIMINAL SEBAGAI  
BUKTI SURAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA NARKOTIKA DI  
PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)

Oleh

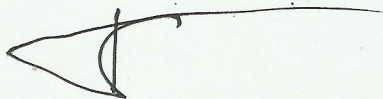
Satya Dipa Asriga

NIM. E0010323

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 16 Juli 2017

Dosen Pembimbing



Kristiyadi, S.H., M.Hum  
NIP. 195812251986011001



PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENGUNAAN BERITA ACARA LABORATORIES KRIMINAL SEBAGAI  
BUKTI SURAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA NARKOTIKA DI  
PENGADILAN NEGERI KARANGANYA

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)

Oleh

Satya Dipa Asriga

NIM. E0010323

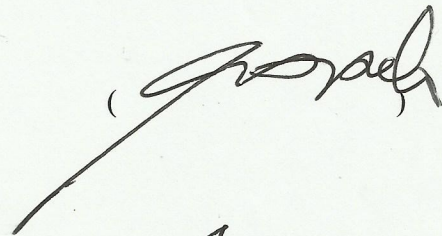
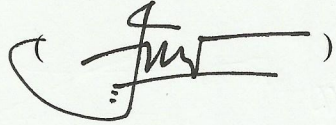
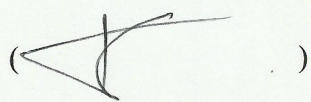
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2017

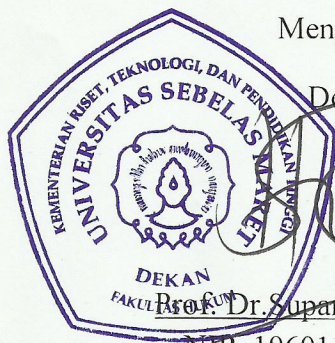
DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H.,M.H  
NIP. 195706291986031002  
Ketua
2. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H  
NIP. 196107211988032001  
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H.,M.Hum  
NIP. 195812251986011001  
Anggota

()  
()  
()

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum

NIP. 19601107198611001



## PERNYATAAN

Nama : Satya Dipa Asriga

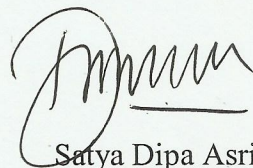
NIM : E0010323

Menyatakan dengan sungguh bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**PENGUNAAN BERITA ACARA LABORATORIES KRIMINAL SEBAGAI BUKTI SURAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditujukan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 16 Juli 2017

Yang membuat pernyataan



Satya Dipa Asriga

NIM. E0010323

## MOTTO

*“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;  
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu”*  
(Matius 7:7)

*“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”*  
(Tan Malaka)

## ABSTRAK

**Satya Dipa Asriga. E0010323. 2017. PENGGUNAAN BERITA ACARA LABORATORIES KRIMINAL SEBAGAI BUKTI SURAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg). Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan berita acara laboratories kriminal sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara narkotika sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Narkotika dengan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat prespektif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif dalam penalaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama bahwa berita acara laboratorium kriminal sebagai alat bukti surat yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP. Mengenai sifat dualisme laboratorium kriminal sebagai keterangan ahli atau surat, dalam putusan penuntut umum menyebut laboratorium kriminal sebagai alat bukti surat, telah dijelaskan bahwa pemberian nama alat bukti ini bebas dan tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti surat yang berupa berita acara laboratories kriminal No. 386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 dengan disertai alat bukti lain yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Kata kunci : berita acara laboratories kriminal, alat bukti surat, narkotika

## ABSTRACT

**Satya Dipa Asriga. E0010323. 2017. THE USE OF CRIMINAL LABORATORIES REPORT AS THE LETTER EVIDENT IN CASE OF INVESTIGATION OF NARCOTICS CASE IN KARANGANYAR DISTRICT COURT. (A Case Study On Verdict Of Karanganyar District Court No. 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg). Legal Writing (Under Graduate Thesis) Faculty of Law, University of March Surakarta.**

*This research has something as a purpose to show how deep the using of instrument of evident is. It is works properly as Criminal Procedural Law or not. Not only for the based of judgement but also for the based of definite the matter of narcotics criminalism.*

*The research is one of normative law research which has two kind of side view, applied knowledge and a perspective with case approach. Primary law material and secondary law material are used for reach this research and collected by literature study.*

*In analyzed method, deductive method is the right chosen according the result of this research, we got the conclusion about official report of criminal laboratories is appropriate with the article 184 section (1) subsection c Criminal Procedural Law, it complies the requirements of instrument of evident. The matter of criminal laboratory dualism as testimony letter in the judgement are appropriate, named as instrument of evident which is free and not became the other consequence in case of giving the power of authentication. The judge who examine and adjudicate the case dropped the sentence at least with two evidence by examining and considering the letter evidence of official report on criminal laboratories No. 386/NNF/2014 dated April 16th, 2014 with another evidence such as witness's testimony and defendant's testimony.*

*Keyword : criminal laboratories official report, letter evidence, narcotics*



## ‘KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, lindungan, penyertaan serta kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul:

**“PENGUNAAN BERITA ACARA LABORATORIES KRIMINAL SEBAGAI BUKTI SURAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memberikan kesempatan dan izin kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Bapak Kristiyadi, S.H.,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan serta bimbingan dalam penulisan sehingga skripsi ini bisa selesai.
4. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H.,M.Hum selaku Ketua Pengelola Penulisan Hukum atas sumbangsih saran dan ide dalam pemilihan judul skripsi ini dan seluruh pengurus PPH yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan semoga kelak dapat bermanfaat.

6. Segenap staff, karyawan, satpam Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Bapak Henry, Ibu Sri Rahayu, Bapak Bambang, Ibu Hartati dan keluarga besar Eyang Sardjoeno yang telah membiayai hingga jenjang ini dan atas doa restu sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Mas Pandu, Arummi, kakak dan adik keluarga besar Eyang Sardjoeno yang selalu memberi semangat dan mengingatkan agar segera menyelesaikan skripsi serta seluruh sanak saudara yang memberi banyak bantuan.
9. Teman-teman Fakultas Hukum UNS Angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuannya.
10. Keluarga Besar PMK FH UNS yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaannya.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini banyak kekurangan maka Penulis menerima kritik dan saran yang membangun yang dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca.

Surakarta, 16 Juli 2017

Penulis



Satya Dipa Asriga

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .....	12
1. Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian .....	12
a. Pengertian Pembuktian .....	12
b. Sistem Atau Teori Pembuktian.....	14
c. Asas-Asas Pembuktian .....	16
2. Tinjauan Tetang Alat Bukti .....	19
a. Jenis Alat Bukti.....	19
b. Asas Minimum Pembuktian .....	23
3. Tinjauan Tentang Surat Sebagai Alat Bukti .....	25
a. Syarat Surat Sebagai Alat Bukti Yang Sah.....	25

b. Kekuatan Pembuktian Surat .....	26
c. Berita Acara Laboratories Kriminal sebagai Bukti Surat Dalam Pemeriksaan Perkara Narkotika.....	29
4. Tinjauan Tentang Narkotika .....	30
a. Narkotika Secara Umum.....	30
b. Narkotika Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 .....	32
B. Kerangka Pemikiran .....	35

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .....	37
1. Identitas Terdakwa.....	37
2. Kasus Posisi .....	37
3. Dakwaan Penuntut Umum .....	38
4. Barang Bukti .....	39
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	39
6. Pertimbangan Hukum Hakim .....	40
7. Putusan Majelis Hakim .....	46
B. Pembahasan.....	47

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	55
B. Saran .....	57

DAFTAR PUSTAKA .....	58
----------------------	----

### LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi masalah dan mendapatkan perhatian yang serius. Penyalahguna narkotika meluas melampaui batasan usia, jenis kelamin dan status sosial. Melihat fenomena tersebut, tak heran jika Indonesia dinyatakan telah berada dalam status darurat narkoba.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika apabila digunakan dengan tidak sesuai takaran yang bisa diterima tubuh manusia maka akan menimbulkan efek buruk pada kesehatan penggunanya. Pada dasarnya penggunaan narkotika sudah diatur dan penyebarannya sudah ditentukan dan diawasi, akan tetapi masih banyak masyarakat awam yang dengan mudahnya mendapatkan narkotika.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Undang-undang telah mengatur tentang penggunaan narkotika dimana narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan tertentu.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian dalam diri pelaku saja, akan tetapi juga menyebabkan kerugian kepada masyarakat luas. Dengan

adanya penyalahgunaan narkoba muncul kerugian yang dialami masyarakat seperti meningkatnya tingkat kriminalitas, munculnya bisnis ilegal di tengah masyarakat serta memicu penyebaran penyakit tertentu. Hal ini sangat mengancam berlangsungnya cita-cita dalam membangun suasana damai dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum acara pidana mengatur setiap orang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan hukum, terkhusus hukum pidana diproses dalam acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk menentukan benar tidaknya orang harus melalui pemeriksaan di depan muka pengadilan. Untuk perkara narkoba dibutuhkan bantuan Kepolisian dengan Laboratorium Forensik sebagai sarana untuk membantu pembuktian dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam perkara narkoba dengan keahlian untuk menguji alat bukti yang ada dan dapat dibuktikan kebenarannya menurut ilmu dan hukum.

Hakim dalam memandang sebuah alat bukti tidak dapat begitu saja menerima sebagai alat bukti yang mampu dipakai sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, namun seorang hakim harus bisa menimbang serta memilah dan memilih apakah bukti yang diserahkan oleh pihak yang bersengketa terhadap hakim bisa dijadikan sebagai pedoman memutuskan persengketaan tersebut.

Kasus narkoba dalam Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg, laboratorium forensik salah satunya melakukan pemeriksaan urin, dengan dikeluarkannya surat keterangan dari laboratorium forensik yang berupa Berita Acara Laboratories Kriminal No. 386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 yang menerangkan bahwa urin terdakwa adalah negatif. Hakim dalam putusannya berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti mengonsumsi narkoba namun dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya ke dalam penulisan hukum dengan judul : **“PENGUNAAN BERITA ACARA LABORATORIES KRIMINAL SEBAGAI BUKTI SURAT**

**DALAM PEMERIKSAAN PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)”.**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggunaan berita acara laboratories kriminal sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Karanganyar sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Apakah hakim Pengadilan Negeri Karanganyar mempertimbangkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratories kriminal dalam putusan perkara narkotika?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dan penelitian tersebut. Maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

**1. Tujuan Objektif**

- a) Mengetahui penggunaan berita acara laboratories kriminal sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara narkotika sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Narkotika dengan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratories kriminal.

## **2. Tujuan Subjektif**

- a) Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman aspek hukum dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai penggunaan berita acara laboratories kriminal sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara narkoba.
- b) Memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penulisan sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, salah satu faktor pemilihan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
- b) Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang penggunaan berita acara laboratories kriminal sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara narkoba sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, di samping itu sebagai pedoman penelitian yang lain.



## **2. Manfaat Praktis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama proses belajar di perkuliahan.
- b) Hasil penelitian ini dapat membantu, memberikan tambahan dan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.
- c) Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang mana telah diteliti oleh penulis.

## **E. Metode Penelitian**

Penggunaan metode penelitian mempunyai peranan penting dalam menyusun suatu karya ilmiah, karena merupakan langkah awal penelitian yang memberikan arah kepada peneliti untuk melaksanakan penelitiannya dengan hasil optimal sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai validitas yang tinggi dan rehabilitasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan metode penelitian yang tepat.

Metode penelitian merupakan satu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang dibahas, di mana metode merupakan cara utama yang digunakan dengan suatu tujuan mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan klasifikasi yang didasarkan pada pengamatan, dapat ditentukan jenis-jenis metode penelitian.

Guna mendapatkan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum yang diperlukan dalam rangka penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Istilah penelitian hukum normatif sebenarnya tidak perlu, karena istilah *legal research* atau penelitian hukum sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang bersifat perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seseorang tersebut sudah sesuai dengan norma hukum sehingga cukup disebut dengan penelitian yang bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013:47-56). Jadi berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis sudah sesuai dengan objek kajian dan isu hukum yang diangkat.

## 2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:22). Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan prespektif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case-approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013:133).

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case-approach*). Dalam penggunaan pendekatan kasus perlu dipahami mengenai *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil (Peter Mahmud Marzuki, 2013:158). Penulis menggunakan pendekatan kasus karena dalam penulisan hukum ini penulis meneliti kasus tentang penggunaan berita acara laboratories kriminal sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusan nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg, yang mana dilakukan dengan mempelajari penerapan dan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

### 4. Jenis Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal

hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181).

Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan, selain itu putusan pengadilan Indonesia menjadi bahan yang penting. Untuk bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah, dan literatur pendapat para sarjana atau doktrin.

a) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.krg.

b) Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- 1) Buku-buku dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penulisan hukum ini;
- 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini;
- 3) Aritikel-artikel di berbagai media cetak maupun media internet yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan sebuah cara untuk mendapatkan bahan kajian terhadap sebuah penelitian. Penelitian yang diangkat penulis merupakan jenis penelitian doktrinal, sehingga dalam pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik pengumpulan sumber hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisis dan membuat sejumlah catatan-catatan dari peraturan perundang-undangan, beberapa buku, jurnal, majalah, artikel dan



literatur lainnya baik dari media cetak maupun elektronik yang relevan dengan kajian hukum yang sedang diteliti oleh penulis.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dikotomi jenis penelitian yang terbagi dalam jenis penelitian empiris dan normatif (*doctrinal*) metode pemikiran dalam sebuah penelitian juga dibagi menjadi dua jenis yaitu metode pemikiran/ analisis secara induksi dan deduksi. Metode pemikiran yang berpangkal secara induksi pada umumnya digunakan pada jenis penelitian normatif. Pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis silogisme deduktif. Di mana seperti pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) dan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus) dari kedua premis tersebut yang kemudian ditarik suatu konklusi/ kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90). Sehingga dapat disimpulkan bahwa logika deduktif menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan menjelaskannya pada hal yang lebih khusus yang pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Di dalam penelitian hukum ini, premis mayor adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan premis minornya adalah fakta hukum (Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 107/ Pid.Sus/ 2014/ PN.krg). Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh pedoman penulisan hukum, secara singkat namun padat dan jelas. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis memberikan uraian mengenai Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis menguraikan bahan kepustakaan yang digunakan mengenai teori-teori pendukung yang menjadi landasan penelitian dan penulisan hukum. Bab ini memuat 2 (dua) sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka Teori berisi tinjauan tentang sistem pembuktian, tinjauan tentang alat bukti, tinjauan tentang surat sebagai alat bukti dan tinjauan tentang narkoba. Kerangka pemikiran berbentuk bagan dengan maksud agar lebih mudah memberikan pemahaman dari penelitian ini.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis menguraikan hasil penelitian yang dihasilkan dari proses menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar penulis melakukan penulisan hukum yang disusun sebagai berikut:

1. Kesesuaian penggunaan berita acara laboratories kriminal sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratories kriminal dalam putusan perkara narkoba menjadi pertimbangan putusan hakim.

**BAB IV : PENUTUP**

Sebagai bagian akhir dari penulisan penelitian mengenai simpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian**

###### **a. Pengertian Pembuktian**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan kata “bukti” merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*, yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya (Andi Hamzah, 1986: 83). Sementara itu membuktikan dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan (Soedirjo, 1985: 47). R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (R. Subekti, 2008:1). M. Yahya Harahap memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2016: 273).



Definisi hukum pembuktian menurut Bambang Poernomo dijelaskan secara tegas sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 5). Hukum Pembuktian menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yaitu merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2001: 10).

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

- a) Ketentuan yang membatasi sidang peradilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b) Bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara

dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- c) Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2003: 273-274).

## **b. Sistem Atau Teori Pembuktian**

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang dibuktikan. Atau dengan kata lain sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.

Sistem atau teori pembuktian (*bewijstheorie*) ada 4 (empat) macam, yaitu (Andi Hamzah, 2004: 247-250):

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, yang kemudian disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak

diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui (*Conviction Intime*)

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukannya juga keyakinan hakim sendiri. Hakim mendasarkan suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan suatu keadaan dan telah dianggap terbukti.

c) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian, dan disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

d) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Berdasarkan teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana, apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu. Bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila alat-alat bukti itu ada dan ditambah keyakinan hakim sendiri.

### c. Asas-Asas Pembuktian

Asas-asas pembuktian tidak hanya secara langsung terkait dengan pembuktian, tetapi juga asas-asas yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pembuktian, termasuk pula beberapa prinsip dalam hukum acara. Berikut beberapa asas terkait hukum acara pidana termasuk dengan pembuktian, yaitu: (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 30-50)

#### a) *Due Process of Law*

Diartikan sebagai seperangkat prosedur yang diisyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Dalam kaitannya dengan pembuktian, *due process of law* memiliki hubungan yang erat dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan.

#### b) *Presumption of Innocent*

Diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah. Dengan arti, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum. Berkaitan dengan pembuktian, asas *presumption of innocent* merujuk pada beban pembagian pembuktian (*bewijslast*). Karena ketika seseorang dianggap tidak bersalah, beban pembuktian tersebut ada pada jaksa penuntut umum yang mendakwa bahwa seseorang telah bersalah melakukan kejahatan.

#### c) *Legalitas*

Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung 3 (tiga) makna, yaitu:

- (a) *lex scripta*, yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis;

(b) *lex certa*, yang berarti bahwa hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas;

(c) *lex stricta*, yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Asas legalitas dalam konteks hukum acara, legalisme itu sendiri cenderung mengesampingkan kebenaran materiil suatu tindak pidana. Konteks pembuktian, rumusan delik dalam suatu undang-undang, selain merupakan perwujudan asas legalitas, juga memiliki fungsi unjuk bukti. Artinya, yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan adalah unsur-unsur dalam suatu rumusan delik yang didakwakan kepada tersangka.

d) *Adversary System*

Diartikan sebagai sistem peradilan di mana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan bukti-bukti yang saling berlawanan dalam usahanya memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya. Berkaitan dengan pembuktian, *adversial system* berhubungan dengan beban pembagian pembuktian. Dalam konteks persidangan pidana, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa dapat saling mengajukan bukti dalam rangka memberatkan atau meringankan dakwaan. Dengan maksud, para pihak yang berperkara di pengadilan dalam mengajukan bukti yang saling berlawanan (*tegen bewijs*).

e) *Beyond a Reasonable Doubt*

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa *beyond a reasonable doubt* adalah standar pembuktian yang digunakan di dalam pengadilan pidana. Di sini jaksa penuntut umum harus membuktikan dan tanpa keraguan yang masuk akal kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa. Berkaitan dengan pembuktian, asas

ini berhubungan dengan beban pembuktian, yang mana beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum.

f) *Actori In Cumbit Onus Probandi*

Diartikan, siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan. Dalam konteks pembuktian, maka asas ini termasuk dalam beban pembuktian yang mana jaksa penuntut umum yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa.

g) *Negativa Non Sunt Probanda*

Diartikan sebagai membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit. Asas ini berkaitan dengan beban pembuktian.

h) *Unnus Testis Nullus Testis*

Diartikan seorang saksi bukanlah saksi, baik dalam pidana maupun perdata dibutuhkan minimal 2 (dua) orang saksi. Dalam konteks parameter pembuktian, asas *unnus testis nullus testis* berkaitan dengan *bewijs minimum* atau bukti minimum yang dibutuhkan untuk memproses suatu perkara.

i) *Unlawful Legal Evidence*

Berarti perolehan bukti yang tidak sah, yang akan menggugurkan perkara. Asas ini sangat berkaitan dengan pembuktian, khususnya perihal cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan (*bewijsvoering*).

j) *Actus Dei Nemini Facit Injuriam*

Dengan arti tidak seorang pun dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Asas ini tidak berkaitan langsung dengan hukum pembuktian. Dalam hal-hal

seperti bencana alam atau peristiwa alamiah maka tidak perlu dibuktikan.

## **2. Tinjauan Tentang Alat Bukti**

### **a. Jenis Alat Bukti**

Alat-alat bukti yang sah menurut R. Atang Ranomiharjo adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Darwan Prints, 1989: 107).

Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut: (Darwan Prints, 1989: 107-117)

#### **a) Keterangan Saksi**

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara itu, menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium De Auditu* (Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP). *Testimonium De Auditu* dapat didefinisikan sebagai keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai

kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh orang lain tersebut (Abdul Karim Nasution, 1975: 55).

b) Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Wirjono Prodjodikoro, 1967: 87-88).

Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP), dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP) (Andi Hamzah, 2004: 269). Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli pada prinsipnya yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.



c) Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang mana surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat-surat resmi hanyalah yang diatur dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, karena surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Sedangkan Pasal 187 huruf d KUHAP termasuk surat biasa, karena setiap hari bisa dibuat oleh seseorang.

Surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, maka dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- (1) *akte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Isi akta ini adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia lihat dan ia lakukan, misalnya berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat penyidik.

(2) *akte partij*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak di hadapan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak, misalnya akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris (Alfitra, 2012:90).

d) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk adalah perbuatan, kejadian, baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain yaitu hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas” (M. Yahya Harahap, 2016: 317).

e) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, memberikan penjelasan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Penempatan alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi-saksi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan

bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

**b. Asas Minimum Pembuktian**

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang menjadi pedoman dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti dalam membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Ditemukannya kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”, dengan maksud bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.

Jadi “minimum pembuktian” yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, paling sedikit “dua alat bukti yang sah”.

Prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti sah, atau paling minimum kesalahan terdakwa harus diuktikan dengan dua alat bukti yang sah;
- b. Dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika hanya dengan satu alat bukti saja atau satu alat bukti yang berdiri sendiri.

Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:

- a. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
- b. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Sebenarnya prinsip minimum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183, tetapi juga dapat dijumpai dalam pasal lain. Namun sebagai aturan umum (*general rule*) dari prinsip minimum pembuktian, diatur dalam Pasal 183. Oleh karena itu, tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 tersebut, perlu juga dibicarakan

beberapa asas yang diatur pada pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP, antara lain:

- a. Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah “satu saksi tidak merupakan saksi”. Istilah itu merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan “*unus testis nullus testis*”;
- b. Pasal 189 ayat (4), keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by on accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Hal tersebut merupakan pedoman yang perlu diperhatikan sehubungan dengan sistem pembuktian yang berkaitan dengan prinsip batas minimum pembuktian dalam pemeriksaan perkara dengan “acara pemeriksaan biasa”. Sistem dan prinsip pembuktian yang berlaku dalam perkara dengan acara pemeriksaan biasa, tidak sepenuhnya diterapkan dalam perkara dengan “acara pemeriksaan cepat”. Misalnya, dalam perkara dengan acara pemeriksaan cepat, pembuktian tidak mutlak dipedomani. Artinya dalam perkara acara cepat, pembuktian tidak diperlukan mesti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim, hal tersebut dapat dibaca dari bunyi penjelasan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### **3. Tinjauan Tentang Surat Sebagai Alat Bukti**

#### **a. Syarat Surat Sebagai Alat Bukti yang Sah**

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang mana surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat-surat resmi hanyalah yang diatur dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, karena surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Sedangkan Pasal 187 huruf d KUHAP termasuk surat biasa, karena setiap hari bisa dibuat oleh seseorang.

Surat resmi/ surat otentik yang diajukan dan dibacakan di sidang pengadilan merupakan alat bukti surat sedangkan surat biasa mempunyai nilai pembuktian alat bukti petunjuk jika isi surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lain.

#### **b. Kekuatan Pembuktian Surat**

Alat bukti surat resmi/ otentik dalam perkara pidana berbeda dengan perdata. Memang isi surat resmi bila diperhatikan dari segi materilnya berkekuatan sempurna, namun pada prakteknya terdakwa dapat mengajukan bukti sangkalan terhadap akta otentik tersebut. Kekuatan pembuktian dari alat bukti surat adalah kekuatan pembuktian bebas seperti halnya kekuatan pembuktian alat bukti lainnya, disini hakim bebas menentukan apakah alat bukti surat tersebut berpengaruh

dalam membentuk keyakinan ataupun tidak. Walaupun begitu bukan berarti hakim bisa menyangkal tanpa alasan suatu alat bukti surat yang sudah terbukti kebenarannya dan bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya.

Nilai kekuatan pembuktian surat menurut M. Yahya Harahap jika dinilai dari segi teoritis serta dihubungkan dengan prinsip pembuktian dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: (M. Yahya Harahap, 2016: 309-312)

#### 1. Ditinjau dari segi formal

Alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b dan c adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat-surat ini dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut :

- a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat yang berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- d. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

#### 2. Ditinjau dari segi materiil



Alat bukti surat tidak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan alat bukti saksi, dan ahli yang sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas yang penilaiannya digantungkan dari pertimbangan hakim. Ketidakterikatannya hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain :

- a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Nilai kebenaran dan kesempurnaan formal dapat disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati yang digariskan oleh penjelasan Pasal 183 KUHAP yang memikul kewajiban bagi hakim untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi seseorang.
- b. Asas keyakinan hakim sesuai yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menganut ajaran sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dimana hakim dalam memutus harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak. Hakim diberi kebebasan untuk menentukan putusan yang diambilnya dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dengan moral yang tinggi atas landasan tanggung jawab demi mewujudkan kebenaran sejati.
- c. Asas batas minimum pembuktian yaitu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan minimal dua alat bukti dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan untuk memberikan keputusan dipersidangan.

**c. Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Bukti Surat Dalam Pemeriksaan Perkara Narkotika**

Laboratorium Forensik Bidang Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya Forensik (Narkobafor) dalam pembuatan berita acara laboratories kriminal bertugas melakukan pemeriksaan narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan dan sediaan psikotropika), laboratorium ilegal (*clandestine labs*), bahan psikotropika dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif dan prekursor).

Pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 1 ayat (7) Perkap No. 10 Tahun 2009.

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, yang menyatakan:

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

KUHAP membedakan keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Alat bukti surat yang diteliti adalah berita acara pemeriksaan laboratories kriminal yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik. Pasal 187 huruf c KUHAP menyatakan: “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;”

Surat yang ditandatangani oleh ahli dan dibuat mengingat sumpah jabatan dibacakan di sidang pengadilan dan mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan ahli yang memberi keterangan di dalam sidang pengadilan.

#### **4. Tinjauan Tentang Narkotika**

##### **a. Narkotika Secara Umum**

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkom* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang (Mardani, 2008 : 78).

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut dapat berupa:

- a. Menenangkan;
- b. Merangsang; dan
- c. Menimbulkan khayalan.

Menurut Sudarto istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam ensiklopedia Amerika dapat dijumpai pengertian narkotika sebagai “*a drug that dulls the sense, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*”. Sedangkan “*drug*” didefinisikan sebagai “*chemical agent that is used therapeutically to treat disease/ morebroadly, drug maybe defined as any chemical agent affecting living protoplasm*”, jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya (Djoko Prakosa dkk 1987: 48).

Smith Kline dan Freeh clinical staff menyatakan: “*narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effects on the central nervous system in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone)*”. Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi system syaraf sentral. Dalam definisi narkotika tersebut sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu

(*morfin, codein, heroin*) dan candu sintetis (*meperidin, methadone*) (Djoko Prakosa dkk 1987: 48).

**b. Narkotika Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009**

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan tujuan dari undang-undang narkotika, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah menjaminn ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelyanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari pnyalahgunaan narkotika; memberantas pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan ketentuan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Sementara itu narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serat mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika dari sumber lain adalah narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau perampasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Adapun sesungguhnya pengadaan narkotika untuk hal-hal tertentu legal untuk dilakukan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk keperluan ketersediaan narkotika disusun rencana kebutuhan tahunan narkotika. Rencana kebutuhan tahunan narkotika disusun berdasar data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian dan pengawasan narkotika secara nasional. Menteri memberi izin khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan

Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika.

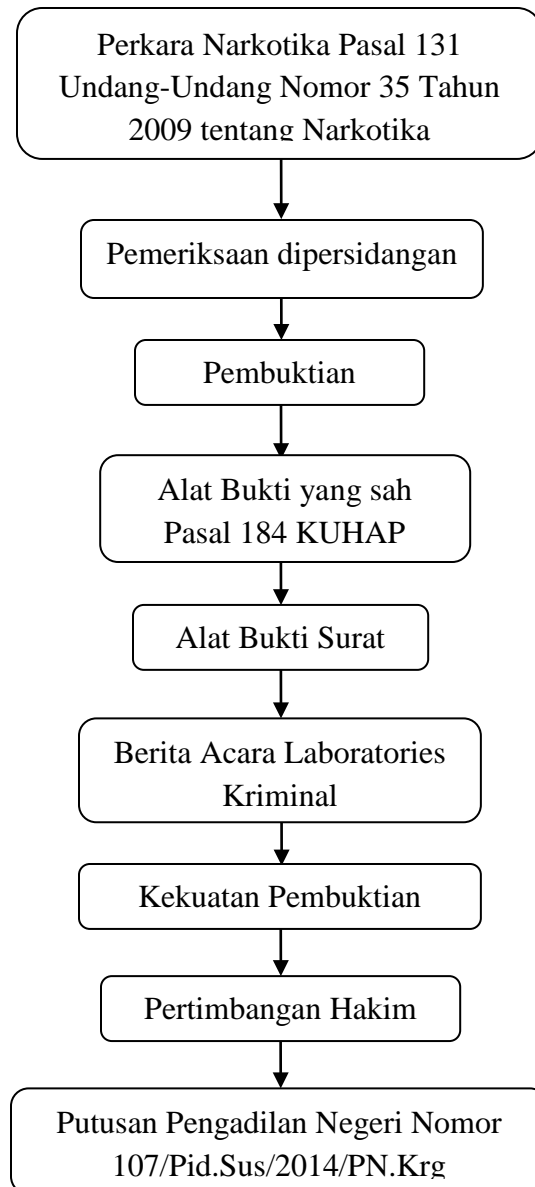
Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi narkotika golongan I dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan secara ketat. Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus dan jangka waktu, bentuk, isi dan tata cara pelaporan diatur dalam peraturan menteri. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan dikenai sanksi administratif oleh menteri atas rekomendasi dari kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan dikenai sanksi administratif yang berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Denda administratif;
- d. Penghentian sementara kegiatan; dan
- e. Pencabutan izin.



## B. Kerangka Pemikiran



### Keterangan bagan Kerangka Pemikiran:

Kerangka pemikiran tersebut penulis buat untuk menjelaskan alur pemikiran penulis dalam menganalisis dan menyusun penelitian hukum. Untuk menemukan jawaban atas dari permasalahan hukum, yaitu untuk

mengetahui penggunaan berita acara laboratories kriminal sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan putusan nomor 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg. Kasus ini bermula adanya perkara narkoba oleh Satria Puji Hudiarso. Dalam pemeriksaan perkara di persidangan, alat bukti surat merupakan hal yang penting, yang mana digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan.

Alat bukti surat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan. Kekuatan pembuktin alat bukti surat itu sendiri adalah kekuatan pembuktian bebas seperti halnya kekuatan pembuktian alat bukti lainnya, disini hakim bebas menentukan apakah alat alat bukti surat tersebut berpengaruh dalam membentuk keyakinan ataupun tidak. Walaupun begitu bukan berarti hakim bisa menyangkal tanpa alasan suatu alat bukti surat yang sudak terbukti kebenarannya dan bersesuaian dengan alat-alat bulkti lainnya.

Setelah proses persidangan selesai, dengan demikian hakim kemudian melakukan pertimbangannya mengenai fakta-fakta yang ada dalam pemeriksaan dan fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan, barulah kemudian hakim menjatuhkan putusannya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

###### **1. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : Satria Puji Hudiarso, SH., bin Warso Kusumo;  
Tempat lahir : Solo;  
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 30 April 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Maduasri A2, RT. 001, RW. 008, Desa  
Gawanan, Kec.Colomadu, Kab. Karanganyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Advokat;

###### **2. Kasus Posisi**

Satria Puji Hudiarso ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Satria Puji Hudiarso sedang berada di rumah Saksi Sosiantoro di Dukuh Gawanan, RT. 001/002, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Saksi Sosiantoro mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan seperangkat alat/ bong yang diisi air, lalu serbuk shabu ditaruh di atas alumunium foil diletakkan dekat pipet yang terpasang pada bong dan dibakar, lalu saksi Sosiantoro menghirup uap yang masuk ke dalam bong melalui sedotan yang terpasang pada sisi lain bong. Pada saat polisi datang, Satria Puji Hudiarso sedang duduk bersila menghadap meja bersama dengan Saksi Sosiantoro.

Pada tempat kejadian perkara tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) paket alat hisap

(bong) botol Rosary, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil (bungkus warna biru orange), 2 (dua) buah korek api warna orange merk Indomaret, 1 (satu) buah kotak kecil warna silver “Zenith”.

Setelah ditangkap, dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel urine Satria Puji Hudiarso, dan hasilnya Negatif (tidak mengandung narkoba/psikotropika). Pada saat yang hampir bersamaan, ditangkap juga Saksi Sri Yanto di luar rumah kontrakan Saksi Sosiantoro, dari Saksi Sri Yanto ditemukan barang bukti paket shabu, bong, dan timbangan. Satria Puji Hudiarso kenal dengan Saksi Sosiantoro awalnya Saksi Sosiantoro adalah klien Terdakwa dalam menangani masalah perceraian. Satria Puji Hudiarso tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Saksi Sri Yanto.

### **3. Dakawaan Penuntut Umum**

Satria Puji Hudiarso didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal, 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

#### 4. Barang Bukti

- a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening;
- b. 2 (dua) paket ganja dalam plastik klip;
- c. 1 (satu) lintingan ganja sisa pakai;
- d. 1 (satu) paket shabu di aluminium foil dalam plastik klip;
- e. 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- f. 1 (satu) paket alat hisap (bong) botol Rosary;
- g. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih silver;
- h. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam;
- i. 2 (dua) pak plastik klip bening;
- j. 1 (satu) gulung aluminium foil (bungkus warna biru orange);
- k. 2 (dua) buah korek api warna orange merk Indomaret;
- l. 1 (satu) buah kotak kecil warna silver “Zenith” yang berisi: 1 (satu) paket besar shabu dalam plastic klip bening, 2 (dua) paket kecil shabu dalam plastic klip bening, 1 (satu) lintingan kecil alumunium foil, potongan pipet kaca, 9 (Sembilan) *cotton bud* warna putih;
- m. Berita Acara Laboratories Kriminal No. 386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014.

#### 5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum menuntut mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Satria Puji Hudiarso, SH. bin Warso Kusumo terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  $\pm$  25 cc urine dalam tube, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## **6. Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal, 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, Terdakwa adalah benar bernama Satria Puji

Hudiarso bin Warso Kusumo yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh Saksi Sepha Dwi dan saksi Fahrudin pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal, 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana masyarakat mempunyai hak



dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan Pasal 107 menggunakan terminologi “dapat melaporkan”, dengan mengaitkan ketentuan tersebut dengan ketentuan Pasal 105 yang menyebutkan bahwa selain adanya hak-hak masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 106, terdapat juga tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang semakin meluas, maka dengan adanya ancaman pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan Pasal 107 tersebut harus ditafsirkan sebagai adanya kewajiban masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana tersebut dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang berwenang menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana adalah Pengadilan, sedangkan kapasitas setiap orang dalam pasal ini hanyalah sebatas menduga/patut diduga adanya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai dengan sengaja tidak melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal di atas;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (*opzet*) dalam Memorie van Toelichting diartikan sebagai *willens en wetten*, perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997: 286);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Sosiantoro di Dukuh Gawan, RT. 001/002, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Saat itu Terdakwa melihat dan mengetahui Saksi Sosiantoro sedang mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan seperangkat alat/bong yang diisi air, lalu serbuk shabu ditaruh di atas aluminium foil diletakkan dekat pipet yang terpasang pada bong dan dibakar, lalu saksi Sosiantoro menghirup uap yang masuk ke dalam bong melalui sedotan yang terpasang pada sisi lain bong;

Menimbang, bahwa saksi Sosiantoro sempat menawarkan pada Terdakwa untuk menghisap shabu tersebut lalu saksi Sosiantoro keluar dari kamar, yang menurut Terdakwa diterangkan bahwa saat itu ia menolak, sedangkan menurut saksi Sosiantoro walaupun ia tidak melihat Terdakwa menghisap, saksi Sosiantoro menerangkan saat ia kembali ke kamar shabu yang sudah disiapkan sudah berkurang jumlahnya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi Sepha Dwi dan saksi Fahrudin bersama rekan-rekannya yang masuk ke rumah dan melakukan penggeledahan, dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket ganja dalam plastik klip, 1 (satu) lintingan ganja sisa pakai, 1 (satu) paket shabu di aluminium foil dalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) paket alat hisap/bong botol Rosary, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) kotak kecil warna silver bertuliskan Zenith berisi: 1 (satu) paket besar shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) lintingan kecil aluminium foil, potongan pipet kaca, 9 (sembilan) cotton bud warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melihat dan mengetahui Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu, dan Terdakwa tahu di rumah saksi Sosiantoro tersebut ada barang bukti berupa serbuk putih shabu, sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa hal tersebut adalah merupakan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, atau Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apalagi Terdakwa adalah seorang sarjana hukum yang berprofesi sebagai Advokat, maka sepatutnyalah Terdakwa mengetahui bahwa hal itu adalah merupakan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Sosiantoro dan saksi Sri Yanto pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa ini berlangsung, juga diperiksa sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, dimana mereka didakwa dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112, Pasal 114, atau Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika, namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, dan Terdakwa tidak menjalankan tanggung jawab tersebut bukan karena adanya suatu halangan atau hal-hal yang berada di luar kekuasaan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112. Pasal 114 atau Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,<sup>1</sup> karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa berprofesi sebagai Advokat yang seharusnya mengetahui tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- b. Terdakwa memperlihatkan sikap menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- c. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pidana tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut adalah setengah dari ancaman pidana maksimum khusus dari pasal yang didakwakan, berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana (sentencing);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti  $\pm$  25 cc urine dalam tabung, adalah merupakan sisa urine Terdakwa yang digunakan sebagai sampel dalam uji laboratoris, dan karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian karenanya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

## **7. Putusan Majelis Hakim**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan kepada terdakwa :

1. Terdakwa Satria Puji Hudiarso, SH., bin Warso Kusumo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  $\pm$  25 cc urine dalam tube, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## **B. Pembahasan**

### **1. Kesesuaian Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pemeriksaan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Karanganyar Dengan Ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**

Sebagaimana telah dikemukakan oleh penuntut umum di depan persidangan yang mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal Nomor: LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes., menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Satria Puji Hudiarto, SH., bin Warso Kusumo yaitu BB-932/214/NNF berupa urine tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Alat bukti surat sendiri diatur dalam Pasal 187 KUHP, yang menyatakan:

“Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Alat bukti keterangan ahli menurut M. Yahya Harahap mempunyai sifat dualisme, dimana yang pertama ahli diminta memberikan keterangan berbentuk laporan atau *visum et repertum*, kedua ahli diminta memberi keterangan secara lisan dan langsung di sidang pengadilan. Dengan adanya dua cara pemeriksaan keterangan saksi ahli. Adapun tentang bentuk keterangan ahli secara lisan dan langsung tidak menjadi masalah karena sifatnya murni sebagai alat bukti keterangan ahli. Sedangkan keterangan ahli yang berbentuk laporan sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan ahli berbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. hal ini ditegaskan oleh penjelasan Pasal 186 alenia pertama yang menjelaskan: “keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”. Bentuk alat bukti keterangan seperti itulah yang diatur dalam Pasal 133 KUHP, yaitu laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan. Oleh penjelasan Pasal 186 alenia pertama, laporan seperti itu “bernilai sebagai alat bukti” keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli “berbentuk laporan”.
2. Pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat. Ketentuan Pasal 187 huruf c menentukan salah satu di antara alat bukti surat, yaitu: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi

kepadanya”. Memperhatikan ketentuan tersebut, salah satu bentuk alat bukti surat termasuk didalamnya “surat keterangan ahli”.

Dengan demikian hakim bebas untuk memberi penilaian dan menyebut alat bukti berikut sebagai keterangan ahli atau surat. Kebebasan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberi nama kepada alat bukti tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian bebas dan tidak mengikat. Nilai pembuktian keduanya tergantung kepada penilaian hakim. Hakim bebas membenarkan atau menolaknya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg maka dapat dikemukakan bahwa alat bukti berita acara laboratorium kriminal sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP, karena telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Mengenai sifat dualisme laboratorium kriminal sebagai keterangan ahli atau surat, dalam putusan penuntut umum menyebut laboratorium kriminal sebagai alat bukti surat, telah dijelaskan bahwa pemberian nama alat bukti ini bebas dan tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian.

Alat bukti surat yang diteliti adalah berita acara pemeriksaan laboratories kriminal yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik. Pasal 187 huruf c KUHAP menyatakan: “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;” Surat yang ditandatangani oleh ahli dan dibuat mengingat sumpah jabatan dibacakan di sidang pengadilan mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan ahli yang memberi keterangan di dalam sidang pengadilan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal Nomor: LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 yang penulis teliti telah memenuhi sebagai alat bukti surat yang sah sesuai pasal 187 KUHAP dengan syarat:



1. Berita acara pemeriksaan laboratories kriminal dibuat atas sumpah jabatan yaitu dengan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes.,
2. Berita acara pemeriksaan laboratories kriminal merupakan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;” sesuai Pasal 187 huruf c.

## **2. Bukti Surat Berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal Dalam Putusan Perkara Narkotika Menjadi Pertimbangan Putusan Hakim**

Sebagaimana telah dikemukakan majelis hakim dalam perkara ini mengenai pertimbangan dalam memutus perkara, majelis hakim menjadikan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal Nomor: LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 sebagai pertimbangan hakim.

Menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, KUHAP sendiri tidak mengatur, akan tetapi dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP:

1. Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Karena surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Peninjauan dari segi formal ini di titikberatkan dari sudut teoritis;
2. Ditinjau dari segi materiil, alat bukti surat bersifat bebas, hakim bebas menilai pembuktiannya, hakim dapat mempergunakan atau

menyingkirkannya. Dasar ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas, yaitu:

- a. Asas proses pemeriksaan pidana ialah untuk mencari kebenaran sejati, bukan kebenaran formal;
- b. Asas keyakinan hakim, seperti terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183, berhubungan erat dengan sistem yang dianut KUHAP yaitu system pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang pada intinya adalah hakim boleh menjatuhkan pidana apabila kesalahan terdakwa terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keyakinan hakim;
- c. Asas batas minimum pembuktian, meski dikatan surat bernilai sempurna namun kesempurnaan yang melekat tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri, dibutuhkan dukungan dari alat bukti lainnya. Melihat Pasal 183 yang menyatakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, alat bukti surat harus dibantu alat bukti lain paling sedikit satu untuk memenuhi yang ditentukan Pasal 183. Hakim bebas menilai kekuatannya dan kebenarannya.

Prinsipnya asas pembuktian yang dianut hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat, karena hukum acara pidana menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP.

Pasal 193 ayat (1) menyatakan penjatuhan keputusan pembedaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan, apabila menurut pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai Pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim.

Pertimbangan yuridis dalam putusan yang diteliti menganut Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Sosiantoro di Dukuh Gawan, RT. 001/002, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa Saksi Sosiantoro mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan seperangkat alat/bong yang diisi air, lalu serbuk shabu ditaruh di atas aluminium foil diletakkan dekat pipet yang terpasang pada bong dan dibakar, lalu saksi Sosiantoro menghirup uap yang masuk ke dalam bong melalui sedotan yang terpasang pada sisi lain bong;
3. Bahwa pada saat polisi datang, Terdakwa sedang duduk bersila menghadap meja bersama dengan Saksi Sosiantoro;
4. Bahwa di tempat kejadian perkara tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) paket alat hisap (bong) botol Rosary, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil (bungkus warna biru orange), 2 (dua) buah korek api warna orange merk Indomaret, 1 (satu) buah kotak kecil warna silver “Zenith”;
5. Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa, dan hasilnya Negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika);
6. Bahwa pada saat yang hampir bersamaan, ditangkap juga Saksi Sri Yanto di luar rumah kontrakan Saksi Sosiantoro, dari Saksi Sri Yanto ditemukan barang bukti paket shabu, bong, dan timbangan;
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sosiantoro awalnya Saksi Sosiantoro adalah klien Terdakwa dalam menangani masalah perceraian;

8. Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Saksi Sri Yanto;

Pertimbangan non yuridis dalam putusan adalah:

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa berprofesi sebagai Advokat yang seharusnya mengetahui tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
2. Terdakwa memperlihatkan sikap menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal Nomor: LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 menjadi pertimbangan putusan hakim. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti surat yang berupa berita acara laboratories kriminal dengan disertai alat bukti lain yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hakim mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal Nomor: LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 atas pengujian urin terdakwa yang ternyata hasilnya adalah negatif. Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara narkoba oleh Satria Puji Hudiarso telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba” dengan pidana 6 (enam) bulan penjara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal Nomor: LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 sebagai bukti surat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesesuaian Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pemeriksaan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Karanganyar Dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal Nomor: LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM.,M.Kes., menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Satria Puji Hudiarso, S.H bin Warso Kusumo yaitu BB-932/214/NNF berupa urine tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Berita acara pemeriksaan laboratories kriminal dapat dapat dikatakan telah memenuhi sebagai alat bukti surat yang sah sesuai pasal 187 KUHAP dengan syarat:

- a. Berita acara pemeriksaan laboratories kriminal dibuat atas sumpah jabatan yaitu dengan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si,

serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM.,M.Kes.;

- b. Berita acara pemeriksaan laboratories kriminal merupakan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;” sesuai Pasal 187 huruf c KUHAP.

Alat bukti berita acara laboratorium kriminal sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP, karena telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Mengenai sifat dualisme berita acara laboratories kriminal sebagai keterangan ahli atau surat, dalam putusan penuntut umum menyebut laboratorium kriminal sebagai alat bukti surat, telah dijelaskan bahwa pemberian nama alat bukti ini bebas dan tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian.

## 2. Bukti Surat Berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal Dalam Putusan Perkara Narkotika Menjadi Pertimbangan Putusan Hakim

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti surat yang berupa berita acara laboratories kriminal dengan disertai alat bukti lain yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hakim mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal No. 386/NNF/2014 tanggal 16 April 2016 atas pengujian urin terdakwa yang ternyata hasilnya adalah negatif.

**B. Saran**

1. Sifat dualisme berita acara laboratories kriminal sebagai keterangan ahli atau surat sebaiknya diperjelas kedudukannya karena penting dalam pembuktian, mengingat berita acara laboratories kriminal sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara meskipun pemberian nama alat bukti ini bebas dan tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian.
2. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus teliti dan berhati-hati dalam membuat dan memasukkan bahan pertimbangan dalam memutus perkara, hakim harus selalu melihat kepada asas pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### Buku

Abdul Karim Nasution. 1975. *Masalah hukum pembuktian dalam proses pidana, Jilid I, II, dan III*. Jakarta: Korps Kejaksaan Republik Indonesia.

Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi Cetakan Kedua)*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Andi hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.

Djoko Prakoso. 1987. *Hukum acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hari Sasangka dan Lily. 2001. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Mandar Maju.

M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua Cetakan ke-15*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R.Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akamedia Pressindo.

Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung.

## **Jurnal**

Hadi Alamri. 2017. *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jurnal Lex Privatum Vol. 5 No. 1 Januari-Februari 2017*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Calvina Fay. 2010. *Drug Testing in The Workplace*. United States : The Journal of Global Drugs Policy and Prattice.

Anggraeni Yuko Isnawangstri, Endbram Riaditya, Tuhi Setiawan. *Pengaruh Alat Bukti Hasil Tes Urin Melalui Pemeriksaan Laboratorium Forensik Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. GEMA Thn XXVII/ 50/ Februari-Juli 2015*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

**LAMPIRAN**



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Satria Puji Hudiarso, SH., bin Warso Kusumo;**
- 2 Tempat lahir : Solo;
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 tahun/30 April 1975;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Perum Maduasri A2, RT. 001, RW. 008,  
Desa Gawan, Kec.Colomadu, Kab. Karanganyar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Advokat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Advokat bernama Joko Mardiyanto, SH., dan Slamet Tri Raharjo, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pen.Pid/2014/PN Krg tanggal 12 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2014/PN Krg tanggal 12 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Satria Puji Hudiarso, SH. bin Warso Kusumo terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:  $\pm$  25 cc urine dalam tube, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terdapat hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang tidak dijadikan pertimbangan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan perlu pula ditelusuri kesalahan itu dilakukan oleh Terdakwa:

- 1 Bahwa faktor yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atas dasar rasa pertemanan, rasa sungkan, namun demikian setidaknya Terdakwa sudah pernah berusaha memberikan saran kepada Sosiantoro alias Penthul agar berhenti menggunakan shabu-shabu;
- 2 Bahwa Terdakwa yang pada awalnya bertujuan akan melakukan konsultasi hukum kepada Sosiantoro namun dengan waktu bersamaan saat itu Sosiantoro sedang menggunakan shabu-shabu di ruangan rumah kontrakkannya, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan pula kedatangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sosiantoro alias Penthul;

- 3 Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Satria Puji Hudiarto, SH., bin Warso Kusumo belum pernah dihukum, telah merasa bersalah, mengakui perbuatannya, berlaku sopan dalam persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, disamping itu Terdakwa yang berstatus sebagai kepala keluarga dan sebagai penyangga hidup keluarga sehingga apabila Terdakwa dihukum penjara terlalu lama atau selama 6 (enam) bulan maka menjadikan keluarga telantarkan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan rasa keadilan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Satria Puji Hudiarto, SH., bin Warso Kusumo pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 di rumah kontrakan Saksi Sosiantoro (dalam berkas terpisah) di Dukuh Gawan RT. 001, RW. 02, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan dengan cara:

- Berawal ketika sebelum penangkapan terhadap Terdakwa Satria Puji Hudiarto, SH., bin Warso Kusumo, saksi Sepha Dwi dan saksi Fahrudin mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat kontrakan saksi Sosiantoro sering digunakan penyalahgunaan narkotika kemudian saksi Sepha Dwi dan saksi Fahrudin beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi Sepha melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Sosiantoro dan temannya selanjutnya mereka masuk ke dalam rumah. Kemudian selang 15 menit saksi Sepha beserta tim mendatangi rumah kontrakan saksi Sosiantoro dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) paket alat hisap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) botol Rosary, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil (bungkus warna biru orange), 2 (dua) buah korek api warna orange merk Indomaret, 1 (satu) buah kotak kecil warna silver “Zenith”;

- Bahwa ketika saksi Sepha beserta tim menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, maka didapat keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang disita semuanya milik saksi Sosiantoro dan saksi Sosiantoro menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) paket alat hisap (bong) botol Rosary, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil (bungkus warna biru orange), 2 (dua) buah korek api warna orange merk Indomaret, 1 (satu) buah kotak kecil warna silver “Zenith” adalah milik Saksi Sosiantoro termasuk shabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan shabu bersama saksi Sosiantoro dua hisapan sebelum petugas menangkap Terdakwa, namun berdasarkan hasil laboratorium forensik kriminalistik Cabang Semarang No. Lab. LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes., menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Satria Puji Hudiarso, SH., bin Warso Kusumo yaitu BB-932/214/NNF berupa urine tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Sepha Dwi H, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satria Puji pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Sosiantoro di Dukuh Gawan, RT. 001/002, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan tugas penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan untuk tempat peyalahgunaan narkoba dan kemudian saksi bersama tim melakukan pengecekan ke TKP;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian, kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan, saksi dan tim masuk ke kamar Saksi Sosiantoro, pada saat itu Saksi Sosiantoro dan Terdakwa sedang duduk bersila menghadap meja dan di situ ada alat penghisap shabu;
- Bahwa dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) paket alat hisap (bong) botol Rosary, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil (bungkus warna biru orange), 2 (dua) buah korek api warna orange merk Indomaret, 1 (satu) buah kotak kecil warna silver “Zenith”;
- Bahwa menurut keterangan Sosiantoro, saat itu Terdakwa baru akan memakai shabu tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Saksi Sosiantoro bahwa shabu tersebut ia dapatkan dari seseorang bernama Selo;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2 **Fahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, dan saksi yang bersama-sama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Sosiantoro di Dukuh Gawan, RT. 001/002, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum’at, petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Sosiantoro tersebut akan ada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba pada hari Minggu, kemudian petugas melakukan pemantauan terhadap Sosiantoro di lokasi tersebut;

- Bahwa tim saksi terdiri dari 5 (lima) orang, termasuk Sepha Dwi dan Y. Riyanto;
- Bahwa setelah diperoleh hasil penyidikan, maka saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan rumah Saksi Sosiantoro. Pada waktu masuk ke kamar, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Sosiantoro sedang duduk di lantai/karpet menghadap ke meja. Di meja tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dan seperangkat alat hisap sabu, korek api gas, dan timbangan *digital*;
- Bahwa alat hisap (bong) tersebut terbuat dari kaca dan ada pipet yang disambungkan ditutupnya;
- Bahwa selain paket sabu, tim juga menemukan barang bukti berupa dua linting ganja, yang satu sisa pemakaian dan satunya masih utuh;
- Bahwa menurut Sosiantoro sabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari membeli;

### 3 Sri Yanto alias Sisri bin Tirtono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2014, Saksi datang ke rumah kontrakan Saksi Sosiantoro di Dukuh Gawan, Colomadu, Karanganyar, untuk mengambil burung Murai Batu dan Murai Hijau yang Saksi jual kepada Saksi Sosiantoro, karena Saksi Sosiantoro mengatakan bahwa burung tersebut suaranya jelek, maka Saksi akan mengambilnya lagi;
- Bahwa Saksi mengatakan akan datang ke rumah Saksi Sosiantoro dua hari sebelumnya melalui telepon, dan pada hari Minggu itu Saksi langsung datang tanpa janji lebih dulu;
- Bahwa sampai di depan rumah kontrakan Saksi Sosiantoro, Saksi dihentikan oleh orang yang berpakaian bebas yang baru kemudian Saksi ketahui sebagai anggota Polisi, Saksi ditanya mengenai tujuannya ke tempat itu, dan Saksi menjawab mau bertemu dengan Saksi Sosiantoro, lalu Saksi digeledah oleh anggota Polisi tersebut;
- Bahwa dari saku jaket Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dalam kotak rokok Dji Sam Soe dan pipet

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, sedangkan dari tas kecil yang Saksi bawa, Polisi menemukan bukti transfer ke rekening BCA atas nama Bintoro;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi, yang Saksi beli seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari seorang bernama Heri yang Saksi kenal di jalan;
- Bahwa Saksi membeli Sabu tersebut dengan cara Saksi memesan lewat SMS, lalu Saksi diberi nomor rekening dan Saksi mentransfer uang melalui ATM ke rekening tersebut, kemudian Saksi mendapat SMS alamat dimana Saksi dapat mengambil Sabu tersebut yaitu di dekat tugu batas kota;
- Bahwa Saksi sudah memakai Sabu yang dibeli tersebut dua hari sebelum Saksi ditangkap, dan Saksi telah memakainya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap di depan rumah Saksi Sosiantoro, Saksi dibawa masuk ke kamar, dan di kamar tersebut Saksi melihat polisi juga sudah mengamankan Saksi Sosiantoro dan Terdakwa Satria Puji, dengan barang bukti berupa beberapa paket Sabu, dua linting ganja, timbangan digital, dan satu set alat hisap (bong);
- Bahwa Saksi tidak tahu Sosiantoro mendapat Sabu dari mana, Saksi juga tidak pernah mengetahui Sosiantoro menjual atau mengedarkan Sabu kepada orang lain, setahu Saksi Sosiantoro membeli Sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa selain untuk mengambil burung, Saksi datang ke rumah Sosiantoro juga untuk meminjam alat hisap (bong) dan menumpang tempat untuk memakai Sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa Satria Puji;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) kali memakai Sabu bersama-sama dengan Saksi Sosiantoro, dimana biasanya mereka masing-masing membawa barang (Sabu) sendiri;

4 **Sosiantoro alias Penthul bin Supeno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah menjadi klien Terdakwa saat perkara perceraian saksi;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke rumah kontrakan saksi untuk konsultasi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan Terdakwa terakhir ke rumah saksi sebelum mereka ditangkap adalah atas permintaan saksi, dimana saksi mengatakan pada Terdakwa kalau lain kali sedang lewat di dekat rumah saksi, Terdakwa diminta untuk mampir karena saksi ingin konsultasi hukum masalah waris;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi di Dukuh Gawan, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, saat itu saksi sedang menghisap shabu, dan saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut menghisap shabu tersebut, lalu saksi menyerahkan bong berisi air yang sudah dipasangkan dengan serbuk shabu dan siap dihisap pada Terdakwa, Terdakwa menerimanya, lalu saksi keluar dari kamar untuk mengurus burung-burung peliharaannya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung apakah Terdakwa sempat menghisap shabu tersebut, tetapi saat saksi kembali ke kamar, saksi melihat shabu yang ada di dalam bong sudah berkurang;
- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang dan masuk ke rumah saksi, lalu saksi, Terdakwa, dan rumah saksi di geledah;
- Bahwa dari rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket ganja dalam plastik klip, 1 (satu) lintingan ganja sisa pakai, 1 (satu) paket shabu di aluminium foil dalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) paket alat hisap/bong botol Rosary, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih silver, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) kotak kecil warna silver bertuliskan Zenith berisi: 1 (satu) paket besar shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) lintingan kecil aluminium foil, potongan pipet kaca, 9 (sembilan) *cotton bud* warna putih;
- Bahwa barang bukti timbangan dan ganja dibawa oleh Erwin ke rumah saksi beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa shabu saksi beli pertama satu minggu sebelum penangkapan, saksi beli 1 (satu) paket sejumlah 2 (dua) gram dari Selo yang saksi hubungi lewat pesan singkat (SMS), lalu saksi mengirimkan uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), setelah dikonfirmasi oleh Selo, saksi diberitahu tempat saksi dapat mengambil paket tersebut. Kemudian saksi membawa shabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pulang dan setelah dipakai ternyata tidak enak karena bercampur dengan tawas;

- Bahwa pada hari Sabtu sebelum penangkapan, saksi membeli lagi sebanyak 1 (satu) paket sejumlah 1 (satu) gram, dengan cara saksi mengirim SMS kepada Selo, lalu Selo memberikan nomor rekening BCA atas nama Sri Rahayu, lalu setelah saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah dikonfirmasi, saksi diberi tahu tempat saksi dapat mengambil paket shabu tersebut yaitu di daerah Pajang, Surakarta, Gapura dekat Puskesmas ada selokan, dan paket shabu tersebut dibungkus lakban dan ditindih batu, lalu saksi membawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah ditangkap, saksi dan Terdakwa dibawa ke Polda Jateng, dan mereka menjalani pemeriksaan *urine*;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. 386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti No. BB-932/2014/NNF berupa 1 (satu) tube urine yang disita dari Satria Puji Hudiarto, SH., bin Warsu Kusumo disimpulkan NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Sosiantoro di Dukuh Gawan, RT. 001/002, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Sosiantoro adalah karena Terdakwa sebagai advokat pernah mendampingi seorang klien bernama Joko Sriyanto, kliennya tersebut menceritakan kalau ada temannya sesama warga binaan Rutan Surakarta bernama Sosiantoro alias Pentul yang akan konsultasi soal perceraian, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Sosiantoro alias Pentul dan kemudian Terdakwa menjadi kuasa dalam proses penyelesaian perkara Sosiantoro alias Pentul di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tahu Sosiantoro alias Pentul pernah dipidana dalam perkara narkotika, dan saat Terdakwa datang ke rumah Sosiantoro alias

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penthul untuk memberikan konsultasi, Terdakwa pernah melihat Sosiantoro alias Penthul mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah kontrakannya tersebut, dan Terdakwa pernah menasehati Sosiantoro alias Penthul untuk mengikuti rehabilitasi narkotika, karena Terdakwa kasihan kepada Sosiantoro alias Penthul khawatir jika tertangkap akan dikenakan sanksi pidana yang berat;

- Bahwa setelah perkara perceraian selesai di tangani, Terdakwa hanya berhubungan dengan Saksi Sosiantoro melalui telepon, dimana saat hari raya atau saat hari ulang tahun Saksi Sosiantoro, Terdakwa memberikan ucapan selamat untuk membina hubungan baik dengan klien;
- Bahwa pada suatu hari Sosiantoro alias Penthul meminta kepada Terdakwa apabila Terdakwa sedang lewat di daerah dekat rumah Sosiantoro alias Penthul, ia diminta untuk mampir karena akan berkonsultasi masalah perkara waris;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 itu, Terdakwa kebetulan lewat di dekat rumah Sosiantoro alias Penthul, karenanya sesuai permintaan Sosiantoro alias Penthul ia mampir;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Sosiantoro alias Penthul mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menghisapnya menggunakan alat hisap bong, Terdakwa berkata pada Sosiantoro alias Penthul, “Mas, kok masih pakai?”, lalu Sosiantoro alias Penthul menawarkan pada Terdakwa untuk ikut menghisap shabu dalam bong tersebut, Terdakwa sempat memegang bong tersebut tetapi kemudian Terdakwa menolak dengan mengatakan bahwa itu sudah masa lalunya, dan ia sudah tidak lagi mengkonsumsi narkotika, lalu Terdakwa meletakkan bong tersebut di atas meja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi yang masuk ke dalam rumah kontrakan Sosiantoro alias Penthul dan menggeledah Terdakwa dan Sosiantoro alias Penthul serta seisi rumah, dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) paket alat hisap (bong) botol Rosary, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil (bungkus warna biru orange), 2 (dua) buah korek api warna orange merk Indomaret, 1 (satu) buah kotak kecil warna silver “Zenith”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sosiantoro alias Penthul yang sudah ada di situ saat Terdakwa datang;
- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan polisi juga menangkap Sri Yanto di luar rumah kontrakkan Sosiantoro alias Penthul, dan dari Sri Yanto juga ditemukan barang bukti berupa paket shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sri Yanto dan belum pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh polisi dan Terdakwa mengikuti tes urine, yang hasil pemeriksaannya negatif (tidak mengandung narkoba);
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 2003 sebanyak sekitar 2 – 4 (dua sampai empat) kali, karena diajak oleh teman-temannya yang ia kenal sejak tahun 1995 saat masih bekerja sebagai *Medical Representatives* di Madiun;
- Bahwa Terdakwa juga pernah disuruh oleh temannya untuk membelikan shabu kepada seseorang saat berada di Madiun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: ± 25 cc urine dalam tube yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan diterangkan oleh Terdakwa sendiri sebagai urinenya yang dijadikan sampel dalam tes narkoba di penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Sosiantoro di Dukuh Gawan, RT. 001/002, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi Sosiantoro mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan seperangkat alat/bong yang diisi air, lalu serbuk shabu ditaruh di atas aluminium foil diletakkan dekat pipet yang terpasang pada bong dan dibakar, lalu saksi Sosiantoro menghirup uap yang masuk ke dalam bong melalui sedotan yang terpasang pada sisi lain bong
- Bahwa pada saat polisi datang, Terdakwa sedang duduk bersila menghadap meja bersama dengan Saksi Sosiantoro;
- Bahwa di tempat kejadian perkara tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) paket alat hisap (bong) botol

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosary, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil (bungkus warna biru orange), 2 (dua) buah korek api warna orange merk Indomaret, 1 (satu) buah kotak kecil warna silver “Zenith”;

- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa, dan hasilnya Negatif (tidak mengandung narkoba/psikotropika);
- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan, ditangkap juga Saksi Sri Yanto di luar rumah kontrakan Saksi Sosiantoro, dari Saksi Sri Yanto ditemukan barang bukti paket shabu, bong, dan timbangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sosiantoro awalnya Saksi Sosiantoro adalah klien Terdakwa dalam menangani masalah perceraian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Saksi Sri Yanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, Terdakwa adalah benar bernama Satria Puji Hudiarto bin Warsu Kusumo yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh Saksi Sepha Dwi dan saksi Fahrudin pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan Pasal 107 menggunakan terminologi “dapat melaporkan”, dengan mengaitkan ketentuan tersebut dengan ketentuan Pasal 105 yang menyebutkan bahwa selain adanya hak-hak masyarakat sebagaimana tersebut

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Krg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 106, terdapat juga tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang semakin meluas, maka dengan adanya ancaman pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, ketentuan Pasal 107 tersebut harus ditafsirkan sebagai adanya kewajiban masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana tersebut dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang berwenang menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana adalah Pengadilan, sedangkan kapasitas setiap orang dalam pasal ini hanyalah sebatas menduga/patut diduga adanya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai dengan sengaja tidak melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal di atas;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (*opzet*) dalam *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai *willens en wetten*, perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997: 286);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Sosiantoro di Dukuh Gawan, RT. 001/002, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Saat itu Terdakwa melihat dan mengetahui Saksi Sosiantoro sedang mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan seperangkat alat/bong yang diisi air, lalu serbuk shabu ditaruh di atas aluminium foil diletakkan dekat pipet yang terpasang pada bong dan dibakar, lalu saksi Sosiantoro menghirup uap yang masuk ke dalam bong melalui sedotan yang terpasang pada sisi lain bong;

Menimbang, bahwa saksi Sosiantoro sempat menawarkan pada Terdakwa untuk menghisap shabu tersebut lalu saksi Sosiantoro keluar dari kamar, yang menurut Terdakwa diterangkan bahwa saat itu ia menolak, sedangkan menurut saksi Sosiantoro walaupun ia tidak melihat Terdakwa menghisap, saksi Sosiantoro menerangkan saat ia kembali ke kamar shabu yang sudah disiapkan sudah berkurang jumlahnya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi Sepha Dwi dan saksi Fahrudin bersama rekan-rekannya yang masuk ke rumah dan melakukan penggeledahan, dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket shabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket ganja dalam plastik klip, 1 (satu) lintingan ganja sisa pakai, 1 (satu) paket shabu di aluminium foil dalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) paket alat hisap/bong botol Rosary, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) kotak kecil warna silver bertuliskan Zenith berisi: 1 (satu) paket besar shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) lintingan kecil aluminium foil, potongan pipet kaca, 9 (sembilan) *cotton bud* warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melihat dan mengetahui Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu, dan Terdakwa tahu di rumah saksi Sosiantoro tersebut ada barang bukti berupa serbuk putih shabu, sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa hal tersebut adalah merupakan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, atau Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apalagi Terdakwa adalah seorang sarjana hukum yang berprofesi sebagai Advokat, maka sepatutnyalah Terdakwa mengetahui bahwa hal itu adalah merupakan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Sosiantoro dan saksi Sri Yanto pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa ini berlangsung, juga diperiksa sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, dimana mereka didakwa dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112, Pasal 114, atau Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika, namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, dan Terdakwa tidak menjalankan tanggung jawab tersebut bukan karena adanya suatu halangan atau hal-hal yang berada di luar kekuasaan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114 atau Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dengan seadil-adilnya;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Krg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berprofesi sebagai Advokat yang seharusnya mengetahui tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa memperlihatkan sikap menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pidana tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut adalah setengah dari ancaman pidana maksimum khusus dari pasal yang didakwakan, berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana (*sentencing*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti  $\pm 25$  cc urine dalam tabung, adalah merupakan sisa urine Terdakwa yang digunakan sebagai sampel dalam uji laboratoris, dan karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian karenanya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Satria Puji Hudiarso, SH., bin Warso Kusumo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:  $\pm$  25 cc urine dalam tube, dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin, tanggal 01 September 2014**, oleh **Dwi Hananta, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Ray Ie, SH.**, dan **Dyah Ratna Paramita, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 02 September 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Ari Karlina, SH., MH.**, dan **Dyah Ratna Paramita, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **M. Zakarim, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dihadiri oleh **Ilham, SH.** Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Krg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ari Karlina, S.H., M.H.**

**Dwi Hananta, S.H., M.H.**

**Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**M. Zakarim, SH.**